

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasi oleh negara. Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negaradapat berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Perusahaan perseroan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal. Salah satu perusahaan di Indonesia yang berbentuk PT adalah PT. Pos Indonesia (Persero).

Melalui jaringan yang dimilikinya, Kantor Pos dapat menjangkau sekitar 58.700 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Wilayah layanan tersebut terbagi dalam 11 Regional.

Pos Indonesia membagi wilayah negara Indonesia sebelas daerah atau divisi regional dalam pengoperasiannya. Pembagian divisi-divisi tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 219 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) tipe A-E. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Regional I Pusat Medan (meliputi Provinsi Aceh dan Sumatra Utara)
2. Regional II Pusat Padang (meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat)
3. Regional III Pusat Palembang (meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung)
4. Regional IV Pusat Jakarta (meliputi provinsi D. K. I. Jakarta dan sebagian Jawa Barat)
5. Regional V Pusat Bandung (meliputi sebagian Provinsi Jawa Barat dan Banten)
6. Regional VI Pusat Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta)
7. Regional VII Pusat Surabaya (meliputi Provinsi Jawa Timur)

8. Regional VIII Pusat Denpasar (meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)
9. Regional IX Pusat Banjarbaru (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan)
10. Regional X Pusat Makassar (meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara)
11. Regional XI Pusat Jayapura (meliputi Provinsi Papua Barat, dan Papua).

Kantor Regional 7 terletak di Surabaya, yang membawahi seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berjumlah 28 unit dan 1 unit Sentral Pengolahan Pos (SPP) yang ada di Jawa Timur. UPT memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai penerimaan pendapatan, penerimaan setoran, dan pembayaran. Selain itu, UPT juga mengelola biaya dari SSC bagian SDM dan Keuangan.

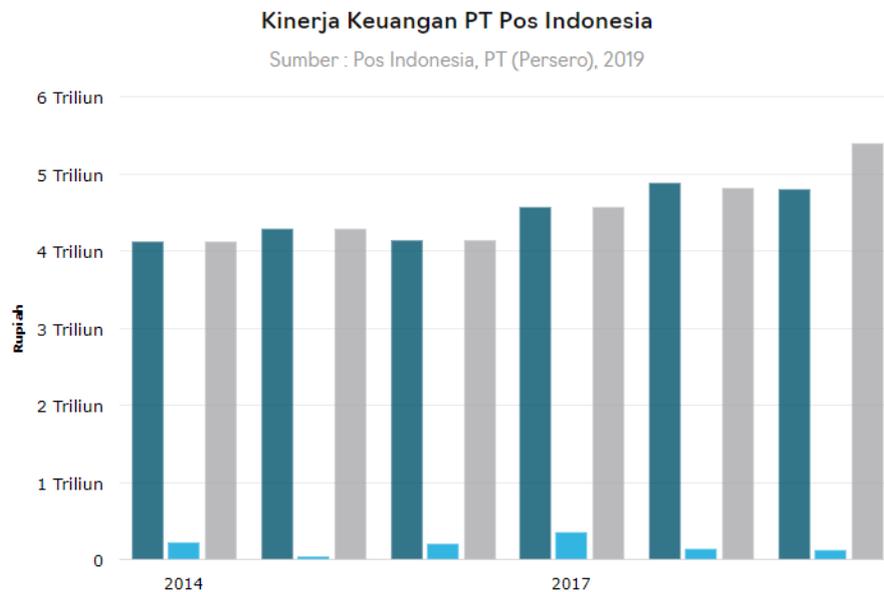
Penerimaan setoran yang dilakukan di UPT dapat berupa penerimaan wesel, dan penerimaan angsuran yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan dalam hal pembayaran, UPT dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembayaran wesel dan pembayaran dana pensiun kepada pensiunan pegawai PT. Pos Indonesia (Persero). Selain UPT, SPP merupakan unit pembantu yang bertugas untuk melakukan pengiriman dalam bentuk non-kas. Seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh SPP dicatat oleh SSC bagian SDM dan bagian Keuangan.

Beberapa tahun terakhir, PT. Pos dikabarkan mengalami masalah terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Sejak 2016, tiga lini bisnis terbesar PT. Pos yakni parcel, jasa keuangan dan surat tidak bisa bersaing dengan optimal. Pada 2017, laba bersih PT. Pos terpengkas dari Rp429 miliar menjadi Rp335 miliar. Lewat laporan tahunan 2017, direksi PT. Pos menyebut, bisnis dan model pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baru, telah menggerus solusi tradisional yang selama ini disediakan oleh PT. Pos.

Contoh kecil ekspansi perusahaan jasa pengiriman dan keuangan, dapat terlihat dalam penyelenggaraan layanan keuangan dengan semakin agresifnya bank melakukan ekspansi jaringan lebih dalam dan jauh ke pelosok negeri dengan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Biaya yang murah dan fitur layanan yang lebih lengkap membuat pergeseran konsumen dari PT. Pos ke bank-bank tidak dapat dibendung. Kondisi ini semakin menggantikan fungsi layanan keuangan Kantor Pos di daerah sub-urban dan rural. Pemerintah pun dengan sangat tegas telah mengalihkan semua penyaluran dana secara nontunai untuk pengendalian dan transparansi yang lebih baik. Tak ayal, pada 2017, segmen jasa keuangan PT. Pos mengalami penurunan pendapatan sebesar 15 persen dibandingkan tahun 2016 menjadi sebesar Rp969 Miliar. (Friana, 2019)

Gambar 1.1

Diagram Kinerja Keuangan PT. Pos Indonesia tahun 2014-2019



Sumber:(Jayani, 2019) <https://databoks.katadata.co.id/>

Keterangan:

- : Pendapatan bersih
- : Laba tahun berjalan
- : Total hutang

Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan sehingga dapat memaksimalkan nilai kinerja perusahaan kedepannya. ini pada prinsipnya adalah ekspektansi kinerja masa depan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan bagian penting dalam pengukuran keberhasilan perusahaan karena menjadi hal awal yang akan dilihat oleh seorang investor.

Penilaian kinerja pada aspek keuangan perusahaan lebih sering menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan

membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan. Kinerja sebuah perusahaan juga bisa dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan.

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah menghitung profitabilitas.

Penilaian kinerja pada aspek keuangan perusahaan lebih sering menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan salah satu ukuran dalam melihat kinerja keuangan perusahaan. Return On Asset (ROA). Salah satu proxy yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah Return on Assets (ROA). ROA dirumuskan dengan membagi total pendapatan sebelum bunga, pajak (EBIT) dengan total aset. Semakin tinggi nilai rasio ROA menunjukkan semakin efektif dan efisien perusahaan mengelola asetnya sehingga memperoleh keuntungan (Lestari, 2017).

Dari uraian di atas menunjukkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan masih

sangat bervariasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan pada Kantor Regional 7 PT. Pos Indonesia (Persero)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Current Ratio* (CR) mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan?
2. Apakah *Debt Equity Ratio* (DER) mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan?
3. Apakah *Total Asset Turn Over* (TATO) mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
2. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh *Debt Equity Ratio* (DER) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
3. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh *Total Asset Turn Over* (TATO) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan laporan keuangan dan hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian dimasa depan terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
- c. Penelitian ini menjadi rujukan bagi pembaca terutama di kalangan akademisi untuk menunjukan kebutuhan akademik pembaca.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan dokumen maupun referensi arsip penelitian pada perpustakaan universitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi manajemen perusahaan dalam membuat keputusan masa depan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan.
- b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan sebelum melakukan

investasi, mengingat laporan keuangan perusahaan
mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan.